



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

NOMOR: 386/SEK.03/KU1.1.1/III/2024
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-005.01.2.539138/2024 tanggal 24 November 2023, perlu menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-005.05.2.539139/2024 tanggal 24 November 2023, perlu menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
 - c. Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Keppres No. 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024.

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 1654/SEK.PTUN.W8-TUN3/KU1.1.1/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2024.

Kedua : Menunjuk Sdri. Apriani Samuel, S.Psi NIP. 198804222019032006 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I / (III/b) Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2024.

Ketiga : Memerintahkan kepada pegawai tersebut untuk dapat melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 25 Maret 2024
Kuasa Pengguna Anggaran

FEFI YANTI THOMAS

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jayapura;
6. Ketua Pengadilan Tinggi TUN Manado;
7. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
8. Pegawai yang bersangkutan;

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Petugas

Pengelola Administrasi Belanja Pegawai
(PPABP)
Pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura
Nomor : 386/SEK.03/KU1.1.1/III/2024
Tanggal : 25 Maret 2024

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

No	Nama/NIP	Jabatan	Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
1	2	3	4
1	APRIANI SAMUEL, S.Psi, / NIP. 198804222019032006	Bendahara Pengeluaran	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan;2. Melakukan penatausahaan semua tembusan surat-surat keputusan kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satuan Kerja yang bersangkutan secara tertib dan teratur;3. Memproses pembuatan Daftar Ga/ii, Uang Duka Wafat/Uang Duka Tewas, Terusan Penghasilan Gaji (Gaji Terusan), Uang Muka Gaji (Persekot Gaji), Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan pembuatan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai lainnya;4. Memproses pembuatan SKPP;5. Memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga;6. Menyampaikan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai beserta ADK Belanja Pegawai dan dokumen pendukung kepada PPK;7. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan melalui Aplikasi GPP Satker setiap awal tahun atau apabila diperlukan untuk disatukan dengan Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan yang diterima dari KPPN;8. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.



Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 25 Maret 2024
Kuasa Pengguna Anggaran

FELIYANTI THOMAS